BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang cepat dan persaingan bisnis yang ketat mendorong perusahaan untuk mencari peluang bisnis yang menguntungkan dan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar (Santoso & Surenggono, 2018). Perkembangan tersebut menjadi peluang serta tantangan tersendiri bagi perusahaan. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat demi mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan bisnisnya yaitu menjaga keuangan agar tetap stabil, efektif, dan efisien dengan cara meningkatkan modal yang dimiliki. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan investor untuk mendapatkan modal tambahan tersebut.

Perusahaan harus memiliki kemampuan memberikan keuntungan demi mempertahankan investor agar tetap menanamkan modalnya. Perusahaan pasti dihadapkan dengan ketidakpastian keadaan yang menyebabkan terkadang mengalami keuntungan atau bahkan kerugian. Oleh karena itu, investor perlu mengetahui kondisi perusahaan untuk mengambil keputusan penanaman modal. Salah satu indikator yang dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai kinerja perusahaan yaitu laporan keuangan (Sagala & Siagian, 2021).

Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan berbagai macam informasi keuangan sehingga pihak yang berkepentingan mampu menilai

kondisi suatu perusahaan (Putra & Supasto, 2022). Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan transaksi yang terjadi di suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat menggambarkan tanggung jawab serta prestasi yang dicapai oleh perusahaan, digunakan sebagai alat komunikasi antara pihak manajemen dan pemangku kepentingan (stakeholder) (Nawa & Hariadi, 2022).

Laporan keuangan digunakan pihak manajemen maupun *stakeholder* untuk mengambil keputusan penting masa depan. Informasi yang disajikan harus memiliki kualitas serta dapat dipercaya oleh penggunanya. Kualitas laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan serta memenuhi harapan berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan akan berfungsi secara maksimal ketika memenuhi beberapa unsur kualitatif seperti mudah dipahami, andal, relevan, serta dapat dibandingkan (Setiawati & Baningrum, 2018).

Realita membuktikan bahwa tidak semua manajemen perusahaan menyadari betapa pentingnya laporan keuangan yang bersih dan terbebas dari kecurangan (Lionardi & Suhartono, 2022). Persaingan bisnis yang ketat antar entitas mendorong perusahaan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan, sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya demi kelangsungan usaha dan terus berkembang. Hal tersebut menyebabkan manajemen menyembunyikan kondisi perusahaan yang kurang memuaskan agar tetap memperoleh pendanaan dari investor maupun kreditur. Salah satu cara untuk menyembunyikan kondisi perusahaan yakni tidak menyajikan

informasi keuangan yang mencerminkan keadaan sebenarnya (Purnama et al., 2022).

Fraud merupakan tindakan menyajikan informasi yang tidak benar secara material dengan tujuan untuk menipu serta menguntungkan diri sendiri (Mardianto & Tiono, 2019). Fraud dilakukan pelaku secara sadar atau sengaja dan termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Fraud menjadi permasalahan global yang dapat terjadi di berbagai organisasi manapun dan kapanpun (Vousinas, 2019). Hal tersebut dapat dilihat dari data kasus fraud yang terjadi di berbagai negara kawasan Asia Pasifik seperti berikut:

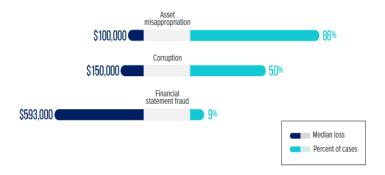
Tabel 1: Jumlah Kasus *Fraud* di Negara Asia Pasifik

Negara	Jumlah Kasus
Samoa Amerika	2
Australia	38
China	33
Fiji	1
Hong Kong	13
Indonesia	23
Laos	1
Malaysia	25
Micronesia	1
New Zealand	6
Papua Nugini	3
Filipina	12
Singapura	13
Kepulauan Solomon	1
Korea Selatan	2
Taiwan	3
Thailand	9
Vietnam	8
Jumlah Kasus	194

Sumber: Laporan ACFE 2022

Berdasarkan tabel 1, terdapat 194 kasus *fraud* sepanjang tahun 2022 di Negara Asia Pasifik. Posisi tertinggi diduduki oleh Australia dengan total 38 kasus *fraud*. Posisi terendah diduduki oleh Fiji, Laos, Micronesia, dan Kepulauan Solomon yang hanya terdapat 1 kasus *fraud*. Negara Indonesia menduduki posisi keempat dengan total 23 kasus *fraud*. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus *fraud* tergolong tinggi.

Berdasarkan gambar 1 kasus *fraud* tertinggi diduduki oleh *asset misappropriation* sebesar 86%, namun dampak rata-rata kerugiannya menduduki posisi terendah sebesar \$100.000. Posisi kedua diduduki oleh *corruption* sebesar 50% yang menimbulkan dampak rata-rata kerugian \$150.000. Posisi terendah diduduki oleh *financial statement fraud* sebesar 9%. Meskipun menduduki kategori jenis *fraud* terendah, *financial statement fraud* memiliki dampak kerugian rata-rata tertinggi yaitu sebesar \$593.000 (ACFE, 2022).



Sumber: Laporan ACFE 2022

Gambar 1: Kategori *Fraud*

Indonesia menduduki posisi keempat dengan kasus *fraud* tertinggi di kawasan Negara Asia Pasifik (ACFE, 2022). Korupsi mendominasi sebagai bentuk *fraud* paling besar di Indonesia dengan persentase 64%, kemudian

disusul oleh penyalahgunaan kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%, serta kecurangan dalam laporan keuangan sebesar 6,7% (Kominfo Jatim, 2023). Meskipun memiliki persentase terendah, kecurangan laporan keuangan menimbulkan kerugian yang paling signifikan diantara jenis *fraud* lainnya. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian khusus karena tidak hanya merugikan pemangku kepentingan namun juga manajemen itu sendiri.

Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja memanipulasi pengungkapan laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga memengaruhi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang salah (Jannah et al., 2021). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan, misalnya *conflict of interest* yaitu investor mengharapkan kinerja perusahaan terus meningkat sehingga manajemen akan berusaha mewujudkannya dengan berbagai cara termasuk berbuat curang. Manajemen perusahaan akan selalu berusaha menunjukkan kinerja terbaik agar memperoleh penilaian yang positif dari pemangku kepentingan. Hal tersebut yang menjadi motivasi utama manajemen memanipulasi laporan keuangan.

Kasus terbaru mengenai kecurangan laporan keuangan di Indonesia dilakukan perusahaan konstruksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Awalnya dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita karya dan Wijaya Karya disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Wakil Menteri BUMN II menyampaikan bahwa

laporan kedua perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (CNN, 2023). Hal tersebut dikarenakan arus kas perusahaan tidak pernah menunjukkan positif, tetapi selalu dalam kondisi laba. Saat ini kasus tersebut sedang dilakukan investigasi oleh Kementrian BUMN dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). PT Waskita Karya juga pernah tersandung kasus manipulasi keuangan pada tahun 2018 yaitu melakukan pencatatan proyek fiktif. KPK mengungkapkan kerugian akibat tindakan tersebut mencapai Rp186 miliar, kemudian pada tahun 2020 terkuak fakta baru kerugian mencapai Rp202 miliar (Mardeliani et al., 2022).

Kasus yang telah dijelaskan di atas menunjukkan masih maraknya kecurangan laporan keuangan di perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi merupakan salah satu jenis perusahaan sektor infrastruktur yang berfokus pada kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana fisik, dan infrastruktur yang memberikan manfaat kepada masyarakat serta beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ACFE (2022) perusahaan konstruksi menduduki peringkat pertama sebagai perusahaan yang sering melakukan kecurangan laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan lainnya yaitu sebesar 18%. Kasus tersebut harus segera diatasi karena sektor infrastruktur memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta aspek sosial dan pembangunan manusia (Rohim, 2024). Pembangunan infrastruktur dapat mempercepat mobilitas yang memungkinkan pemerataan wilayah serta mengurangi biaya logistik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan.

Kasus kecurangan laporan keuangan yang semakin meningkat mendorong para ahli untuk mengembangkan teori mengenai *fraud*. Teori mengenai *fraud* pertama kali dikembangkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 yang disebut *fraud triangle*. Teori tersebut terdiri dari tiga elemen yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tahun 2004 Wolfe & Hermanson mengembangkan teori tersebut bernama *fraud diamond* yang menambahkan elemen kemampuan. Crowe mengembangkan kembali teori tersebut pada tahun 2011 bernama *fraud pentagon* dengan menambahkan elemen arogansi, kemudian Vousinas pada tahun 2019 mengembangkan teori tersebut bernama *fraud hexagon* dengan menambahkan elemen kolusi (Sagala & Siagian, 2021).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *fraud hexagon*. Teori ini merupakan teori terbaru yang digunakan untuk mendeteksi *fraud* serta penyempurnaan teori sebelumnya. *Fraud Hexagon* terdiri dari enam elemen yaitu *stimulus, opportunity, rationalization, capability, ego, collusion* (Vousinas, 2019). Vousinas berpendapat bahwa *collusion* merupakan elemen utama dalam banyak kasus *fraud* dan kejahatan keuangan (Larum et al., 2021).

Elemen pertama teori *fraud hexagon* yaitu *stimulus* atau tekanan. Berdasarkan penelitian Sihombing & Panggulu (2022) tekanan diproksikan dengan variabel *financial target*. *Financial target* merupakan ketetapan yang harus dicapai suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi target tersebut, akan menjadi suatu tekanan bagi

manajemen. Tekanan tersebut akan mendorong manajemen untuk melakukan fraudulent financial statement (Mardianto & Tiono, 2019).

Penelitian terdahulu mengenai *financial target* dilakukan oleh Sihombing & Panggulu (2022) menunjukkan bahwa *financial target* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian Sholikatun & Makaryanawati (2021) menunjukkan bahwa *financial target* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Elemen kedua teori *fraud hexagon* yaitu *opportunity* atau peluang. Berdasarkan penelitian Sari & Irawati (2021) peluang diproksikan dengan variabel *ineffective monitoring*. *Ineffective monitoring* yaitu kondisi kurangnya kontrol kinerja serta tidak efektifnya sistem internal perusahaan. Pengawasan yang kurang akan menyebabkan manajemen merasa tidak diawasi, sehingga memicu peluang adanya tindakan kecurangan. Semakin tinggi pengawasan yang tidak efektif akan mendorong timbulnya *fraudulent financial statement* (Kusumosari & Solikhah, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai *ineffective monitoring* dilakukan oleh Sari & Irawati (2021) menunjukkan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian (Annisa & Halmawati, 2020) menunjukkan bahwa *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Elemen ketiga teori *fraud hexagon* yaitu *rationalization* atau rasionalisasi. Berdasarkan penelitian Farmashinta & Yudowati (2019) rasionalisasi diproksikan dengan variabel *change in auditor*. Auditor merupakan pihak

yang memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai segala hal yang terjadi dalam perusahaan termasuk adanya potensi *fraud*, sehingga manajemen akan menghilangkan bukti kecurangan dengan mengganti auditor. Perusahaan yang secara terus menerus melakukan pergantian auditor memungkinkan perusahaan tersebut melakukan *fraudulent financial statement* (Mardianto & Tiono, 2019).

Penelitian terdahulu mengenai *change in auditor* dilakukan oleh Farmashinta & Yudowati (2019) menunjukkan bahwa *change in auditor* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian Imtikhani & Sukirman (2021) menunjukkan bahwa *change in auditor* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Elemen keempat teori *fraud hexagon* yaitu *capability* atau kemampuan. Berdasarkan penelitian Aviantara (2021) kemampuan diproksikan dengan variabel *change in director*. Jabatan yang tinggi dalam suatu perusahaan dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan peluang berbuat curang (Achmad et al., 2022). *Change in director* akan menciptakan *stress period* karena direktur baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi, hal tersebut akan menyebabkan penurunan efektivitas kinerja dan manajemen akan memanfaatkan celah untuk berbuat curang.

Penelitian terdahulu mengenai *change in director* dilakukan oleh Aviantara (2021) menunjukkan bahwa *change in director* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian Sihombing &

Panggulu (2022) menunjukkan bahwa *change in director* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Elemen kelima teori *fraud hexagon* yaitu *ego*. Berdasarkan penelitian Kusumosari & Solikhah (2021) ego diproksikan dengan variabel CEO *duality*. CEO *duality* merupakan kondisi ketika CEO merangkap dua atau lebih posisi dalam satu perusahaan. Merangkap suatu jabatan mencerminkan bentuk ego CEO untuk memaksimalkan kekuasaan yang dimiliki dalam perusahaan, hal tersebut mengakibatkan CEO merasa paling berkuasa dan melanggar kebijakan perusahaan demi keuntungan pribadi (Sihombing & Panggulu, 2022). Selain itu, konsep CEO *duality* di Indonesia terjadi apabila terdapat ikatan keluarga dengan dewan komisaris (Kusumosari & Solikhah, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai CEO *duality* dilakukan oleh Kusumosari & Solikhah (2021) menunjukkan bahwa CEO *duality* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian Sihombing & Panggulu (2022) menunjukkan bahwa CEO *duality* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Elemen keenam teori *fraud hexagon* yaitu *collusion* atau kolusi, berdasarkan penelitian Kusumosari & Solikhah (2021) kolusi diproksikan dengan variabel *state-owned enterprises*. *State-owned enterprises* merupakan suatu perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan milik pemerintah mendapat beberapa meliputi stabilitas kepemilikan serta jaminan finansial di masa krisis, hal tersebut dapat memicu

perusahaan tidak memperhatikan kinerjanya (Gaio & Pinto, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN RI (2021:18), pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh RUPS, diketahui bahwa sebagian besar saham dimiliki oleh pemerintah. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengangkat seseorang atas dasar hubungan istimewa dan meningkatkan kolusi (Kusumosari & Solikhah, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai *state-owned enterprises* dilakukan oleh Kusumosari & Solikhah (2021) menunjukkan bahwa *state-owned enterprises* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*. Sedangkan penelitian Sagala & Siagian (2021) menunjukkan bahwa *state-owned enterprises* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dijabarkan di atas serta penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi hasil, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana *Fraudulent Financial Statement* dalam Pandangan Teori *Fraud Hexagon* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah *financial target* berpengaruh terhadap *fraudulent financial* statement?

- b. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*?
- c. Apakah *change in auditor* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*?
- d. Apakah *change in director* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*?
- e. Apakah CEO *duality* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*?
- f. Apakah *state-owned enterprises* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *financial target* terhadap *fraudulent financial statement*.
- b. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *ineffective monitoring* terhadap *fraudulent financial statement*.
- c. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *change in auditor* terhadap *fraudulent financial statement*.
- d. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *change in director* terhadap *fraudulent financial statement*.
- e. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh CEO *duality* terhadap *fraudulent financial statement*.

f. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *state-owned enterprises* terhadap *fraudulent financial statement*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

a. Manfaat Operasional (praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperoleh informasi dalam rangka mengetahui faktor-faktor yang memotivasi fraudulent financial statement, sehingga dapat membantu praktisi, manajemen, dan pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan fraudulent financial statement.

b. Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (akademis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan di bidang ilmu akuntansi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi fraudulent financial statement. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi peneliti selanjutnya.